

**Article Type:** Research Paper

## Analisis Hubungan Korupsi, Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Lucia Maison Putri<sup>1</sup>, Mike Triani<sup>2</sup>

<sup>a</sup>Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Corresponding Author : [lucia.putri23@gmail.com](mailto:lucia.putri23@gmail.com)

### Abstract

The study was conducted to: (1) Determine the response to corruption resulting from the shock of democracy and economic growth in Indonesia. (2) Knowing the democratic response resulting from the shock of corruption and economic growth in Indonesia. (3) Knowing the response to economic growth due to the shock of corruption and democracy in Indonesia. The data used in this study are secondary data, sourced from the KPK annual report website and sourced from BPS (Badan Statistics Center). VAR analysis method is used to determine the two-way relationship between variables. The results of the research are: (1) There is no causal relationship between corruption and democracy. However, there is only a one-way relationship between corruption and democracy (2) There is no causal relationship between corruption and economic growth. However, there is only a one-way relationship between corruption and growth. economy (3) There is no causal relationship between democracy and economic growth. However, there is only a one-way relationship between democracy and economic growth. Based on the research results, it is suggested that the Government can implement policies in handling cases of corruption and democracy because it will affect the welfare of society and the government system in Indonesia. The government also pays more attention to the public sector and the community's economic sector so that they can contribute to improving the welfare of the community.

**Keyword :** Corruption, Democracy, Economic Growth, VAR.

### Abstrak

Penelitian dilakukan untuk: (1) Mengetahui respons korupsi akibat dari adanya shock demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (2) Mengetahui respon demokrasi akibat dari adanya shock korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (3) Mengetahui respon pertumbuhan ekonomi akibat dari adanya shock korupsi dan demokrasi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari situs laporan tahunan KPK dan bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik). Metode Analisis VAR digunakan untuk mengetahui hubungan dua arah antar variabel. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Tidak adanya hubungan kausalitas antara korupsi dengan demokrasi. Namun hanya terdapat hubungan satu arah antara korupsi dengan demokrasi (2) Tidak adanya hubungan kausalitas antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hanya terdapat hubungan satu arah antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi (3) Tidak adanya hubungan kausalitas antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hanya terdapat hubungan satu arah antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Pemerintah dapat menerapkan kebijakan dalam menangani kasus korupsi dan demokrasi karena akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah juga lebih memperhatikan sektor public dan sektor perekonomian masyarakat agar dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata-Kunci:** Korupsi, Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, VAR

Kode Klasifikasi JEL : D73, F43

### AFFILIATION

Jurusan Ilmu  
Ekonomi, Fakultas  
Ekonomi,  
Universitas Negeri  
Padang

### DOI

-

### KUTIPAN:

Putri, L,M & Triani,M  
Analisis hubungan  
kurupsi, demikrasi dan  
pertumbuhan ekonomi di  
Indonesia 3(1) 17-24

### INFO ARTIKEL

#### Diterima:

24 Januari 2021

#### Disetujui:

28 Februari 2021

#### Terbit Daring:

1 Maret 2021

## PENDAHULUAN

Masalah korupsi tidak sejalan dengan perkembangan demokrasi dan perekonomian di Indonesia saat-saat ini. Hal ini dikarenakan tingkat korupsi di Indonesia yang meningkat di Indonesia semakin memperburuk perkembangan demokrasi dan menurunnya produktivitas masyarakat. Franz Magnis Suseno (2003) pernah menulis: "Mengapa rezim Pak Soeharto jatuh? Dikarenakan kebijakan ekonomi yang tidak tepat? Atau karena kesalahan konseptual? Bukan, tapi dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang menggrogoti ketahanan perekonomian negara, menggrogoti ketahanan hukum, ketahanan moral dan ketahanan bangsa Indonesia". Hal ini membuktikan bahwa masalah korupsi memang sejak lama telah menjadi biang kerok dalam masalah ketahanan dan perekonomian negara Indonesia.

Korupsi merupakan masalah panjang dalam penyelidikan perekonomian di Indonesia, korupsi pada umumnya merupakan hambatan terbesar dalam masalah pembangunan di sektor publik. Penelitian (Mamadu, 2006; Okere, 2005; Sen, 1999; Jain, 2001; Bank Dunia, 2011; Huntington, 1968) mengatakan bahwa korupsi adalah "Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi". Korupsi dapat menyebabkan rusaknya perkembangan ekonomi suatu negara. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan korupsi dalam proyek).

Korupsi dapat menyebabkan rusaknya perkembangan ekonomi suatu negara. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan korupsi dalam proyek). Sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan proyek tersebut tidak akan tercapai. Korupsi sangat mempengaruhi beberapa sektor pemerintahan di Indonesia yaitu sektor yang sangat dipengaruhi adalah sektor keuangan. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia saat ini sangat marak memperbincangkan masalah korupsi, di mana kasus korupsi di Indonesia saat-saat ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, di mana masyarakat merasa telah ditipu atau diperbodohi oleh pemerintahan sehingga masyarakat merasa kurang percaya kepada pemerintahan Indonesia.

Demokrasi diciptakan agar dapat memberantas korupsi yang ada di Indonesia, sehingga sistem demokrasi diharapkan dapat memberantas korupsi di Indonesia. Namun, masalah yang dihadapi sekarang malah masalah korupsi yang meredupkan demokratisasi di Indonesia semakin menghilang, di mana kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi tidak diberikan. Hal ini sama pada zaman pemerintahan Soeharto di mana sistem pemerintahan Soeharto hancur karena banyaknya kasus korupsi, sehingga menjatuhkan sistem pemerintahan dan ketahanan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa indeks demokrasi Indonesia masih berada di posisi sedang. Perubahan angka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2017-2018 yaitu dipengaruhi oleh penurunan dalam aspek kebebasan sipil yaitu sebesar (0,29 poin) dari 78,75 menjadi 78,46 selanjutnya penurunan aspek hak politik yaitu sebesar (0,84 poin) dari 66,63 menjadi 65,79 dan peningkatan aspek lembaga demokrasi sebanyak 2,76 poin yaitu dari 72,49 menjadi 75,25.

Rivera-Batiz (2002) didefinisikan demokrasi sebagai berikut: "apakah suatu negara memiliki checks and balances pada kekuasaan eksekutif, proses konstitusional dan jaminan, kebebasan pers dan tidak adanya sensor, peradilan dan hukum yang jelas dan efektif struktur,

batasan masa jabatan, dan transparansi, keterbukaan dan masukan warga dalam pembuatan kebijakan ”.

El-Rufa'i (2003), demokrasi didefinisikan sebagai sistem politik yang di dalamnya dibuat untuk membingkai aturan yang memaksimalkan kesejahteraan orang. Rivera-Batiz (2002) didefinisikan demokrasi sebagai berikut: “apakah suatu negara memiliki checks and balances pada kekuasaan eksekutif, proses konstitusional dan jaminan, kebebasan pers dan tidak adanya sensor, peradilan dan hukum yang jelas dan efektif struktur, batasan masa jabatan, dan transparansi, keterbukaan dan masukan warga dalam pembuatan kebijakan ”.

Menurut Henry B.Mayo dan diikuti oleh Ni'matul Huda mendefinisikan demokrasi sebagai system politik yaitu demokrasi merupakan kebijakan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu kebebasan politik Kondisi ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi dengan adanya kebijakan pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Keadaan politik dan kebijakan publik sangat memicu pergerakan ekonomi di Indonesia. Berkembangnya suatu perekonomian dengan cepat yaitu didasari dengan adanya Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah yang dimiliki. Seperti yang telah di jelaskan bahwa Korupsi, Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lain.

Kondisi ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi dengan adanya kebijakan pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Keadaan politik dan kebijakan publik sangat memicu pergerakan ekonomi di Indonesia. Berkembangnya suatu perekonomian dengan cepat yaitu didasari dengan adanya Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah yang dimiliki. Seperti yang telah di jelaskan bahwa Korupsi, Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lain.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, sehingga terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu: Sisi output total (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Menurut Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel korupsi, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di indonesia,

## TINJAUAN LITERATUR

### 1. Hubungan Korupsi dan Demokrasi

Penelitian Kotera, Okada dan Samreth (2012) melakukan penelitian mengenai Ukuran pemerintah, demokrasi, dan korupsi: Investigasi empiris. Dimana hasilnya mengatakan bahwa hasil estimasi menunjukkan peningkatan ukuran pemerintah dapat menyebabkan penurunan korupsi jika tingkat demokrasi cukup tinggi dan, sebaliknya, dapat menyebabkan peningkatan korupsi jika terlalu rendahnya demokrasi.

Kalenborn and Lessmann (2012) dengan judul penelitian Dampak demokrasi dan kebebasan pers korupsi: Persyaratan penting. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa demokratis hanya berfungsi untuk mengendalikan korupsi, jika ada kebebasan pers dalam derajat tertentu di suatu negara, dan begitu pula sebaliknya. Implikasi kebijakan kami adalah bahwa reformasi demokrasi lebih efektif, jika memang demikian disertai dengan reformasi kelembagaan yang memperkuat pengawasan politisi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi dan demokrasi dapat dikendalikan dengan adanya kebijakan politisi yang kuat, agar korupsi dapat dibatasi dengan kebijakan pemerintahan di suatu negara.

## 2. Hubungan Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Alfada (2019) melakukan penelitian mengenai Dampak destruktif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: model ambang batas. Dimana hasilnya mengatakan bahwa dampak korupsi menunjukkan pertumbuhan ekonomi memburuk apabila tingkat korupsi di bawah ambang batas dan dampak destruktif korupsi tampak lebih kuat untuk provinsi dengan tingkat korupsi di atas ambang batas. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung tidak langsung korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Mauro (1995) dan Blackburn et al. (2006), meneliti pengaruh langsung korupsi pada pertumbuhan ekonomi dan menyajikan bukti tentang dampak buruknya. Studi ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa korupsi memiliki efek penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Meon dan Weill (2010) dan Kato and Sato (2015), memberikan bukti yang mendukung Hipotesis "melumasi roda" dan menyatakan bahwa korupsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Del Monte dan Papagni dan Mauro, menunjukkan bahwa negara-negara terjebak dalam salah satu dari dua ekuilibria (korupsi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah atau korupsi rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi). Brianzoni dkk. membuktikan keberadaan kondisi mapan lebih lanjut yang ditandai dengan tingkat perantara modal per kapita dan korupsi

## 3. Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan ekonomi

Salahodjaev (2015) meneliti tentang Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi: Peran intelijen dalam regresi lintas negara. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi memiliki dampak negatif atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, secara empiris menyelidiki efek interaktif demokrasi dan intelijen terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan data dari 93 negara, selama periode 1970–2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan-hubungan antar demokrasi dan pertumbuhan PDB riil bervariasi dengan tingkat kemampuan kognitif suatu negara. Hasilnya tetap kuat untuk berbagai teknik estimasi, variabel kontrol dan periode waktu.

## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari situs Laporan Tahunan KPK dan Situs Badan Pusat Statistik (BPS).

## DEFINISI OPERASIONAL

### Korupsi

Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan hak rakyat untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pemerintahan. Tingkat korupsi yang digunakan yaitu data yang berdasarkan pengaduan masyarakat yang diperoleh dari situs laporan tahunan KPK. Data yang digunakan adalah Panel dalam bentuk data per tahun

### Demokrasi

Demokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat agar sistem pemerintahan yang diharapkan masyarakat dapat dipenuhi. Demokrasi diukur melalui indeks demokrasi Indonesia dari situs BPS, data yang digunakan adalah panel dalam bentuk per tahun.

### Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perekonomian masyarakat disuatu negara,dengan mengharapkan kesejahteraan masyarakat.Tingkat pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan tingkat Pdrb.Data yang digunakan yaitu data panel dalam bentuk per tahun yang diperoleh dari situs BPS.Model penelitian dengann menggunakan model standar VAR menjadi sebagai berikut:

$$1) . K_t \sum_{i=0}^n \beta_i K_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i D_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i PE_{t-i} + U1_t \dots \dots \dots (3. 1)$$

$$2) . D_t \sum_{i=0}^n \beta_i D_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i K_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i PE_{t-1} + U2_t \dots \dots \dots (3. 2)$$

$$3) . PE_t \sum_{i=0}^n \beta_i PE_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i K_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i D_{t-i} + U3_t \dots \dots \dots (3. 3)$$

Dimana:

- K : Korupsi
- D : Demokrasi
- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- αβ : Koefisien Regresi

**HASIL PENELITIAN**

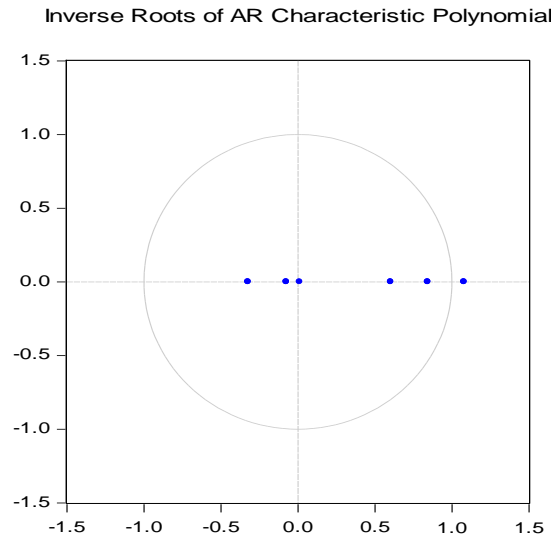
Tabel 4.9 Hasil Output Granger Causality Variabel Korupsi, Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi

Pairwise Granger Causality Tests  
 Date: 08/18/20 Time: 22:58  
 Sample: 2014 2018  
 Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D01 does not Granger Cause K	101	0.81190	0.4470
K does not Granger Cause D01		9.61510	0.0002
PE does not Granger Cause K	102	7.94184	0.0006
K does not Granger Cause PE		1.82699	0.1664
PE does not Granger Cause D01	101	10.1909	0.0001
D01 does not Granger Cause PE		0.16203	0.8506

Hasil analisis diatas GrangerCausality pada tabel 4.9 diatas menerangkan bahwa dari keseluruhan variabel yang di uji dengan tingkat keyakinan 0,05 hanya terdapt hubungan kausalitas satu arah dari masing-masing variabel.Adanya hubungan kausalitas satu arah antara variabel demokrasi terhadap korupsi,selanjutnya hubungan kausalitas satu arah antara variabel korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan kausalitas satu arah antara variabel demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi.

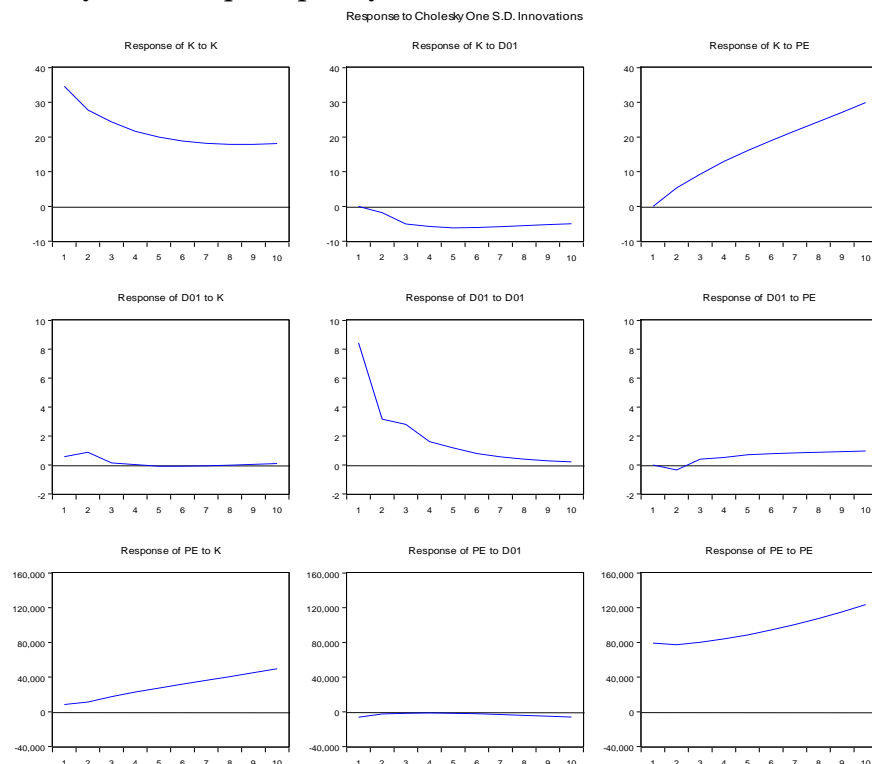
Pengujian Stabilitas model



**Gambar 4.1 Hasil Uji Stabilitas VAR**

Sumber: Olahan Data Eviews 8,2020

Titik InverseRoots Of AR Characteristic Plynominal berada di dalam, dikarenakan terdapat satu titik berada di luar lingkaran. Hal ini menunjukkan bahwa gambar diatas merupakan model VAR yang tidak stabil hingga hasil pengujian Impluse Respon Function Variance Decompositionnya tidak dapat dipercaya.



Pertama, respon korupsi terhadap demokrasi (Response of (K) to (D)). Hasil Impluse Respon Function menunjukkan perubahan atau shock yang terjadi pada korupsi mengalami penurunan dari tahun pertama sampai tahun kesepuluh. Kedua, respon demokrasi terhadap korupsi (Response of (D) to (K)).

Hasil Impluse Respon Function menunjukkan perubahan atau shock yang terjadi pada demokrasi terhadap korupsi yaitu mengalami Fluktuasi dimana pada tahun pertama sampai tahun kedua mengalami peningkatan.

Namun, pada tahun ketiga mengalami penurunan hingga tahun keempat, dari tahun keempat hingga tahun kesepuluh terlihat konstan atau tetap berada sejajar dengan garis keseimbangan. Ketiga, respon korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi (Response Of (K) to (PE)). Hasil Impulse Response Function menunjukkan perubahan atau shock yang terjadi pada tahun pertama hingga tahun ke sepuluh yaitu terus-menerus mengalami peningkatan sehingga tetap berada di atas garis keseimbangan.

Keempat, respon Pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi (Response Of (PE) to (K)). Dimana pada tahun pertama hingga tahun ke sepuluh terus mengalami peningkatan hingga tetap berada di atas garis keseimbangan. Hal ini menunjukkan adanya respon positif pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi.

Kelima, respon demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi (Response Of (D) to (PE)). Dimana pada tahun pertama hingga tahun kedua garis kurva berada di bawah garis keseimbangan. Namun, di tahun ketiga sampai tahun ke sepuluh mengalami peningkatan hingga melewati garis keseimbangan. Hal ini menunjukkan adanya respon positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keenam, respon pertumbuhan ekonomi terhadap demokrasi (Response Of (PE) to (D)). Dimana pada tahun pertama hingga tahun kesepuluh garis kurva berada di bawah garis keseimbangan. Namun, garis kurva tetap stabil dan sejajar dengan garis keseimbangan.

## KESIMPULAN

Hasil dalam pengujian memperlihatkan bahwa tidak adanya hubungan kausalitas antara korupsi dengan demokrasi. Namun hanya terdapat hubungan satu arah antara korupsi dengan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas tiap-tiap variabel yaitu ( $0,4470 > 0,05$ ) dan ( $0,0002 < 0,05$ ). Maka didapatkan hasil bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima untuk variabel korupsi dengan demokrasi, serta  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak untuk variabel demokrasi dengan korupsi. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan kausalitas antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hanya terdapat hubungan satu arah antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel yaitu ( $0,0006 < 0,05$ ) dan ( $0,1664 > 0,05$ ). Maka didapat asumsi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima untuk variabel korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak untuk variabel pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan kausalitas antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hanya terdapat hubungan satu arah antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel yaitu ( $0,0001 < 0,05$ ) dan ( $0,8506 > 0,05$ ). Maka terdapat asumsi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima untuk variabel demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak untuk variabel pertumbuhan ekonomi terhadap demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Ariefianto, D. (2012). *EKONOMETRIKA: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- BEkananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Time Series* (Edisi Kedu). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Brianzoni S, Coppier R, Michetti E. Multiple equilibria in a discrete time growth model with corruption in public procurement. *Qual Quant* 2015:1–24
- Colagrossi, M., Rossignoli, D., Maggioni, M. A., Colagrossi, M., Rossignoli, D., & Maggioni, M. A. (2019). Does Democracy Cause Growth? A Meta-Analysis ( of 2000 regressions ). *European Journal of*

- Political Economy*, 101824. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.101824>
- Dr. Budiono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: PBF, 1992, hal.1.
- Del Monte A, Papagni E. Public expenditure, corruption, and economic growth: the case of Italy. *Eur J Polit Econ* 2001;17(1):1–16
- Fauzan, I. (2012). *Menelaah Korupsi dan Demokrasi di Indonesia*. 4 (2).
- Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. *European Journal of Political Economy*, 60(August), 101810. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001>
- Huang, C. J. (2016). Is corruption bad for economic growth? Evidence from Asia-Pacific countries. *North American Journal of Economics and Finance*, 35(100), 247–256. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2015.10.013>
- Johnston, M. (2000a), Corruption and Democracy: Threats to Development , Opportunities for Reform, Hamilton, NY: Colgate University [online, accessed 15 August 2020, available at: <http://anti-corr.ru/archive/Corruption%20and%20Democracy.pdf>]
- Junaidi, I. K. P. (2017) *Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. 3 (1) Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2012). Government size , democracy , and corruption : An empirical investigation. *Economic Modelling*, 29(6), 2340–2348. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.022>
- Kumar, P., Narayan, S., & Smyth, R. (2011). Does democracy facilitate economic growth or does economic growth facilitate democracy? An empirical study of Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, 28(3), 900–910. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.11.004>
- Mauro P. Corruption and growth. *Q J Econ* 1995;110:681–712
- Minea, A. (2018). *Forms of democracy and economic growth volatility* ☆. (December 2017), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.07.013>
- Nawatmi, S. (2016). Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik. 31 (1).
- Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES, 1994, hal.27-35
- Satrianto, A. (2017). Kebijakan Fiskal, Moneter dan Neraca Pembayaran di Indonesia: Suatu Kajian Efektifitas. *Economac*, 1(2). <https://doi.org/10.24036/20171241>
- Rami, S., Jetter, M., & Montoya, A. (2015). *The Effect of Democracy on Corruption : Income is Key*. 74, 286–304. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.016>
- Rosadi, Dedi. 2012. *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: ANDI
- Salahodjaev, R. (2015). Intelligence Democracy and economic growth : The role of intelligence in cross-country regressions. *Intelligence*, 50, 228–234. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2015.04.013>
- Suharyadi, Purwanto S.K. 2013. *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2. Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat